

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelum lahirnya Balai Pemasyarakatan, di Indonesia telah dikenal jawatan Reklasering yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1927, dengan Gouvernenta Belsuit tanggal 5 Agustus 1927 yang berpusat di Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang maksudnya untuk kesejahteraan orang-orang Belanda dan Indonesia yang memerlukan pembinaan khusus. Pemerintah Belanda pada saat itu memberi subsidi pada badan Reklasering Swasta dan Pra yuwana dan memberi tugas kepada sukarelawan perorangan (Volunteer Probation Officer) yang selanjutnya menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga.¹

Usaha pengembangan kegiatan *Reclassering* yang telah ada tersebut pelaksanaannya kurang efektif karena kegiatannya hanya ditujukan pada orang-orang Belanda dan peranakan Belanda saja. Hal ini disebabkan sangat sulit mencari tenaga pelaksana dan mahal biaya operasional, maka kegiatan *Reclassering* ini semakin tersendat-sendat dan akhirnya tidak ada sama sekali.

Pada Tahun 1964 diadakan musyawarah Dinas Kepenjaraan se Indonesia di Lembang Bandung, yang merekomendasikan sistem

¹ Aminah aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, 1998, hlm96

kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan digunakan metode pendekatan baru yang menempatkan terpidana sebagai manusia yang harus tetap dihargai harkat dan martabatnya sesuai dengan falsafah Pancasila. Perlakuan terhadap narapidana ditujukan untuk melahirkan sikap sadar, insaf dan tertib dalam hidup bermasyarakat. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana tidak cukup diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi juga diperlukan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, maka lahirlah Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember Nomor 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen yang didalamnya terdapat Direktorat Balai BISPA (Bimbingan dan Pengentasan Anak), yang berada dibawah Direktorat Tuna Warga.

Perkembangan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. JH. 4/6/13 tanggal 17 April 1967 dibentuk Inspeksi Bispa wilayah yang meliputi Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tanggal 22 Mei 1970 dibentuk Kantor BISPA di kota-kota besar Indonesia salah satunya di Bandung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JS.1/6/19 tanggal 22 Mei 1970. Kegiatan Balai BISPA semakin lama semakin menunjukkan eksistensinya maka untuk mengatur kegiatan dan tata kerja Balai BISPA lahirlah keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.PR.07.03 tahun 1987 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai BISPA . Pada tahun 1997

terjadi perubahan nama menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI N0. M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 yang disusul oleh Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PR.07.03.17 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Balai BISPBA menjadi BAPAS.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, BISPBA berubah nama menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara Anak baik di dalam maupun di luar sidang. Selanjutnya membimbing, membantu dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan

² Ruben Achmad, "*Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*", dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hlm 24

tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.0-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja. Dalam pelaksanaan kerja tersebut didalam tubuh BAPAS mengalami kendala internal dan eksternal.

Berbagai macam kasus pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini karena faktor keturunan. Perbuatan pidana yang terjadi tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal atau seimbang atas perilaku atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.³

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴

³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Indonesia*. Biro Konsultan & Bantuan Hukum, univ Brawijaya, Malang, 1999, hlm.15

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hlm. 1.

Balai Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatannya (*residive*).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana karena

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 13 Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan dari perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah perubahan narapidana untuk pengembalian ke masyarakat.

Keberhasilan pembinaan tidak hanya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga partisipasi dari berbagai pihak, substansi hukum, sosial, dan substansi lainnya. Karena itu program pembinaan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Narapidana yang selanjutnya disebut Klien pemasyarakatan, untuk berintegrasi ke masyarakat dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam bentuk program Bimbingan Kemasyarakatan. Proses pembimbingan di luar LAPAS tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu baik syarat *administrative* maupun syarat *substantive* dengan seleksi yang sangat ketat, oleh karena itu tidak semua warga binaan pemasyarakatan dapat memperoleh haknya tersebut. Tujuan bimbingan tersebut yaitu :

1. Membantu klien menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat.
2. Membantu klien melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
3. Membantu klien memperbaiki relasi sosial dengan orang lain.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Bandung merupakan BAPAS yang terbesar di wilayah Jawa Barat, dengan cakupan wilayah berdasarkan lampiran I Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 23 Februari 2007 No.M.06.PR.07.03 tahun 2007, wilayah kerja Bapas Klas I Bandung meliputi sebagian besar wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 3 (tiga) kotamadya dan 8 (delapan) kabupaten, yaitu :

1. Kota Bandung.
2. Kota Cimahi
3. Kota Sukabumi
4. Kabupaten Bandung
5. Kabupaten Bandung Barat
6. Kabupaten Sumedang
7. Kabupaten Sukabumi
8. Kabupaten Cianjur
9. Kabupaten Purwakarta
10. Kabupaten Subang.
11. Kabupaten Karawang.

Sedangkan jumlah pegawai BAPAS Klas 1 Bandung hanya memiliki 39 orang dari jumlah ideal yaitu 131 orang.

Atas kekurangan SDM di Bapas klas I Bandung berdampak pada pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam proses perkara yang dijalani dimana pendampingan dari Bapas diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pendampingan itu wajib dilaksanakan oleh Bapas.

Dalam kasus yang terjadi di Polrestabes Bandung dan Polres Sumedang terdapat beberapa Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak mendapatkan pendampingan secara menyeluruh sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Aank, dengan alasan keterbatasan SDM yang dimiliki tidak sebanding

dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum maka pendampingan pun tidak berjalan sesuai yang harus dilaksanakan.

Semenjak berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut data yang diperoleh hingga saat ini ada beberapa Anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana yang tidak didampingi Bapas dalam kasusnya, antara lain:

- 1) BAP Diversi / musyawarah dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada tanggal 27 September 2014, AIPTU Opik Oktapian sebagai Kanit PPA Polrestabes Bandung.
- 2) Rujukan:
 - a) Pasal 6 huruf a, b, c, dan e, pasal 7 (1) UURI No 11 Tahun 2012 SSPA.
 - b) LP nomor : LP/1056/XII/2014/SMD, tanggal 25 Oktober 2014
- 3) Terlapor dalam perkara ini sebagai teman dekat laki-laki korban.
- 4) Diversi/musyawarah di hadiri oleh :
 - a) Terlapor
 - b) Orang tua korban
 - c) Saksi-saksi dari pihak terlapor dan pelapor berjumlah 6 orang
 - d) Ibu pelapor.
- 5) Kesimpulan kedua belah pihak telah sepakat, bahwa permasalahan ini tidak akan ditempuh keranah hukum dan akan di tempuh dengan cara kekeluargaan saja.

Dalam kasus diversi tersebut, selama diversi berlangsung tidak terdapat Bapas yang mendampingi.

- 1) BAP Diversi / mediasi dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada tanggal 09 Desember 2014, Brigadir Onih dan AIPTU Sujarwo S.H sebagai Penyidik di Polrestabes Bandung.
- 2) Rujukan :
 - a. Pasal 6 huruf a, b, c, dan e, Pasal 7 ayat (1) UURI No 11 Tahun 2012 SPPA.
 - b. LP nomor : LP/2189/X/2014/JBR, tanggal 22 oktober 2014.
Pelapor Sdri. J I, tentang tindak Pidana Perlindungan Anak.
- 3) Terlapor dalam perkara ini masih SMP.
- 4) Diversi dihadiri oleh :
 - a. Orang tua terlapor
 - b. D G (saksi Korban)
 - c. Orang tua J (pelapor)
 - d. Para terlapor
 - e. Perwakilan dari P2TP2 kota Bandung
 - f. Kesiswaan SMP BPI
 - g. Kepala sekolah SMPN 2 Bandung
 - h. Staff SMPN 2 Bandung
 - i. Kuasa hukum

5) Pada pelaksanaan diversi / mediasi, penyidik mempersilahkan kepada pihak pelapor, orang tua terlapor, perwakilan SMPN 2 BDG, dan perwakilan SMP BPI BDG untuk menyampaikan keinginan guna tercapainya musyawarah dan mufakat demi kepentingan anak secara keseluruhan (keinginan dan pernyataan para pihak di rahasiakan).

6) Kesimpulan :

Semua pihak yang hadir dalam acara Diversi dan mediasi ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan D G, M J A R, E A R, G R M secara musyawarah dan mufakat untuk kepentingan semua anak. Mengenai penggantian biaya pengobatan belum dapat di realisasikan pihak Sdri.J I. Sebagai pelapor (orang tua D G) belum dapat menunjukan kwitansi seluruh biaya pengobatan dan Sdri. J I masih akan melakukan pemeriksaan terhadap D G.

Dalam penerapan Diversi pada kasus M J A R, E A R, G R M, sebagai terlapor, terdapat ketidaksesuaian pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

Tidak adanya rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan mengenai kesepakatan Diversi, yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa kesepakatan Diversi yang dibuat dalam kasus ini dibuat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak, yakni terlapor dan pelapor.

Seharusnya Bapas bisa bekerja secara optimal sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam masalah pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti halnya kasus ini :

- 1) BAP Diversi / mediasi dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada tanggal 29 Desember 2014, Brigadir Onih sebagai Penyidik.
- 2) Rujukan :
 - a. Pasal 6 huruf a, b, c, dan e, Pasal 7 ayat (1) UURI No 11 Tahun 2012 SPPA.
 - b. LP nomor : LP/2720/XII/2014/JBR, tanggal 26 Desember 2014.
Pelapor Sdr, Ayi Engkos (ayah korban).
- 3) Terlapor dalam perkara ini sebagai teman dekat korban dan masih pelajar.
- 4) Diversi dihadiri oleh :
 - a. L sebagai terlapor
 - b. Orang tua terlapor
 - c. Ayi engkos sebagai ayah korban juga sebagai pelapor
 - d. Perwakilan dari P2TP2 kota Bandung
 - e. Tokoh masyarakat dari pelapor
 - f. Kuasa hukum
 - g. Perwakilan dari BAPAS
- 5) Pada pelaksanaan diversi / mediasi, penyidik mempersilahkan kepada pihak pelapor, orang tua terlapor, perwakilan P2TP2A, kuasa

hukum, perwakilan BAPAS untuk menyampaikan keinginan guna tercapainya musyawarah dan mufakat demi kepentingan anak secara keseluruhan yang pada intinya, terlapor mengakui kesalahannya, dan orang tua terlapor telah meminta maaf atas perbuatannya anaknya kepada pelapor sebagai ayah korban, pelapor memberikan pemaafannya dengan syarat terlapor tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menjauhi korban, terlapor pun akan menyanggupi syarat tersebut.

6) Kesimpulan :

Semua pihak yang hadir dalam acara Diversi dan mediasi ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mufakat untuk kepentingan terlapor dan korban. Jika terlapor melanggar persyaratan pelapor maka kasusnya tidak akan lagi di mediasi atau diselesaikan secara diversi.

Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Bandung, diharapkan dapat membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan baik sehingga klien tersebut dapat diterima dengan baik pula oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimanakah **“KETERBATASAN SDM BAPAS KLAS I BANDUNG DALAM MENDAMPINGI ANAK DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari Bapas klas I Bandung yang tidak mendampingi anak dalam proses penyidikan dihubungkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam penanganan anak diwilayah kerja Bapas klas I Bandung dalam penyelidikan?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Bapas Klas I Bandung agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayahnya dapat didampingi Bapas dalam proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum dari Bapas klas I Bandung yang tidak mendampingi anak dalam proses penyidikan dihubungkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam penanganan anak diwilayah kerja Bapas klas I Bandung dalam penyelidikan.

3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Bapas Klas I Bandung agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum diwilayahnya dapat didampingi Bapas.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut, juga terdapat kegunaan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan keterbatasan sumber daya manusia (sdm) yang terdapat di dalam Bapas Klas I Bandung ini. Dilihat dari khalayak sarannya, hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Bandung, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri Bandung dan Fakultas Hukum Unpas.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal itu dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak anak dan perlindungannya.⁵

Alinea ke 4 (empat) pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

⁵ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 67

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan UUD 1945 ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila yang secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalam agamis, ekonomi, ketahanan sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular. Pancasila merupakan falsafah negara, maka dari itu segala tindak tanduk kehidupan bangsa Indonesia harus berdasarkan Pancasila.⁶

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak:

1. Prinsip pertama non diskriminasi bermakna bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya.
2. Prinsip kedua kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan.

⁶ H.R Otje Salman dan Anthon F Susanto, Teori Hukum : *Mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 158

3. Prinsip ketiga hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan.
Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak.
4. Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak.
Sebagian dari orang tua atau guru masih alergi dengan yang namanya pendapat anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur adanya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang termuat dalam Pasal 1 butir 24:

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.”

Dalam Pasal 84 ayat (5):

“Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

Dalam Pasal 85 ayat (5):

“Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

Dalam pasal 87 :

- “(1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
 (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
 (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Perlindungan pada tersangka yang dalam hal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting, yaitu antara lain:

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷

Peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.⁸

Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah ketersediaan jumlah Bapas yang ada dan hubungan bimbingan kemasyarakatan dengan penyesuaian diri Klien, dimana dengan adanya jumlah bapas yang sesuai atau memadai bimbingan yang diberikan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada klien, diharapkan dapat mengubah perilaku sosial yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dimasyarakat, sehingga klien tersebut dapat menyesuaikan diri dengan baik dan dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat tempat klien tersebut menetap atau tinggal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dan 9, bahwa pengertian pembimbingan dan klien pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 70.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 75

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya yang di maksud dengan klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Bimbingan yang diberikan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri klien secara menyeluruh, yaitu kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga tujuan dari pembimbingan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya sekian banyak model pembimbingan di dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS), ini tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya klien pemasyarakatan mempunyai bekal dalam menjalani kehidupan setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Umumnya setelah narapidana anak menyelesaikan masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau yang sekarang menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang telah dibina dan dibekali dengan pendidikan umum, agama dan keterampilan, serta di bimbing dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) banyak masyarakat menganggap bahwa mantan narapidana adalah kelompok masyarakat yang harus dihindari, diwaspadai bahkan diasingkan dari pergaulan masyarakat, sehingga mereka cenderung sulit untuk

bersosialisasi dan menyesuaikan diri secara baik serta mencari pekerjaan sehingga dapat mengulangi perbuatannya yang disebut residivis. Masyarakat banyak menganggap bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang kini menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai saat ini masih menggunakan sistem kepenjaraan yang membuat narapidana jera dengan sanksi kekerasan dan menganggap Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah sekolah kejahatan dan banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) beserta fungsi dan tugas-tugasnya dalam membimbing eks narapidana.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai undang-undang yang berlaku dalam hal Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Bapas dalam ketersediaannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang ketersediaan BAPAS bagi anak yang berkonflik dengan hukum di hubungan dengan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai ketersediaan Bapas Kelas I Bandung.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penulisan, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier dan penelitian lapangan jika diperlukan, adapun penejelasannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Peraturan Pemerintah RI No. 31-32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Serta Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat

membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) mengenai penerapan diversi dan penyidikan, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

4) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung yang menangani kasus-kasus terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 15.

data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan keterbatasan SDM Bapas.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data

sekunder dan data primer adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada praktisi hukum serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan diperoleh berupa data sekunder dan data primer dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan secara kualitatif, penafsiran hukum, selanjutnya

disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Penafsiran hukum yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

b. Instansi:

- 1) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat, Jalan Jakarta No 27 Kota Bandung.
- 2) Balai Pemasarakatan Klas I Bandung, Jalan Ibrahim Adjie No.43

8. Tabel Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Januari 2015	Februari 2015	Maret 2015	April 2015	Mei 2015	Juni 2015
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah.